

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal	:	Kamis, 19 Februari 2026
Jam	:	13.00
Acara	:	Rapat Evaluasi Capaian LKjIP 2025
Tempat	:	R. Rapat Dinas
Pemimpin Rapat	:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar
Hadir dalam rapat	:	Plt. Sekretaris, Kepala Bidang, , JFT, Kasubbag, Ka UPTD Rusunawa dan staf
Hasil Rapat	:	1. Rapat diawali dengan pengarahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar perihal pencapaian target dan realisasi tahun 2025 dan pelaporan kinerja yang merupakan kewajiban opd untuk melaporkan tiap tahun; 2. Paparan draft LKjIP 2025 oleh Kasubag program; 3. Hasil Tanya jawab / diskusi : - Capaian kinerja sasaran 2 merupakan hasil perhitungan dari bidang kawasan permukiman, bidang perumahan (PSU), Penanganan jalan dan drainase kawasan lingkungan (PUPR) dan Program RT Keren, - Sasaran 1 hanya dihitung dari peningkatan RTLH yang ditangani oleh DPRKP yaitu peningkatan kualitas RTLH sebanyak 124 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 6 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 10 unit, Program Bedah Rumah dari BAZNAS Kota Blitar untuk Peningkatan RTLH 1 Unit; - Tindaklanjut agar terus dipantau untuk hasil yang lebih baik di tahun depan; - Sebaiknya hasil tindaklanjut terus dilaporkan oleh masing-masing bidang tiap triwulan bersama dengan atau menjadi kelengkapan capaian monev triwulanan. 4. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PRKP adalah sebagai berikut : 1. Kenaikan jumlah Rumah Layak Huni tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, 2. Penerapan standar teknis Rumah Layak Huni di lapangan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi 3. Menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH 4. Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP 5. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan 6. Berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah 7. Belum adanya perencanaan yg terintegrasi dalam penanganan kumuh skala Kawasan 8. Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman 5. Tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni
 2. Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos
 3. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN
 4. Pengusulan BNBA RTLH kepada Kementerian PKP
 5. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN
 6. Mendorong penyediaan rumah layak huni terjangkau oleh pengembang perumahan dan masyarakat
 7. Perlu disusun perencanaan secara terpadu dalam penanganan kawasan kumuh skala kawasan dan kolaborasi antar OPD dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.
 8. Melakukan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman
6. Faktor pendukung untuk pencapaian target yang lebih baik :
1. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya
 2. Adanya Kolaborasi antar perangkat daerah dalam rangka penyediaan dan peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan
 3. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman

Notulis,



FENNY OKTAVIA ANGGADEWI
NIP. 198410232024212000

Pengarahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Fokus hari ini mengevaluasi capaian kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini bukan sekadar kewajiban administratif tahunan, melainkan wujud pertanggungjawaban nyata kita kepada masyarakat Kota Blitar atas pelayanan Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
2. Kepala Dinas menekankan pentingnya komitmen bersama, keselarasan program dengan target sasaran daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyerapan anggaran yang efektif.
3. Memastikan setiap target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi anggaran tersaji secara akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Mensinkronkan program penataan kawasan permukiman, penyediaan rumah layak huni, dan pengelolaan prasarana-sarana dengan target RPJMD Kota Blitar.
5. Jika ada yang perlu segera perbaiki catatan evaluasi dan rekomendasi SAKIP tahun lalu agar akuntabilitas kinerja dinas kita terus meningkat sesuai dengan hasil desk kemaren. Setiap bidang harus saling mendukung dalam penyediaan data dukung, hindari ego sektoral antar-seksi atau bidang di lingkungan dinas. Penekanan khusus untuk Sekretaris dan para Kabid agar terus memantau progres capaian kinerja tiap triwulan
6. Optimalisasi program prioritas seperti penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, serta upaya mempertahankan atau meningkatkan predikat nilai SAKIP instansi.
Untuk RTLH dengan adanya pengurangan anggaran disikapi dengan mengajukan ke program BSPS melalui aplikasi MYPKP dan SIBARU yang telah dilaksanakan pada bulan Januari dengan mengajukan bantuan untuk 1440 unit dan ini harus terus dikawal agar mendapatkan hasil yang maksimal.
7. Dari paparan yang telah dijelaskan oleh kasubag program, desk telah dilaksanakan kemaren dan rekomendasi telah ditindaklanjuti semuanya. Dengan anggaran yang turun cukup significant yaitu Rp. 13 M lebih di 2025 sedangkan di 2026 sekitar Rp 8 M, kita tetap berusaha bekerja dengan sebaik – baiknya, tetap semangat dan semoga tetap mendapatkan hasil yang optimal.

DAFTAR HADIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR

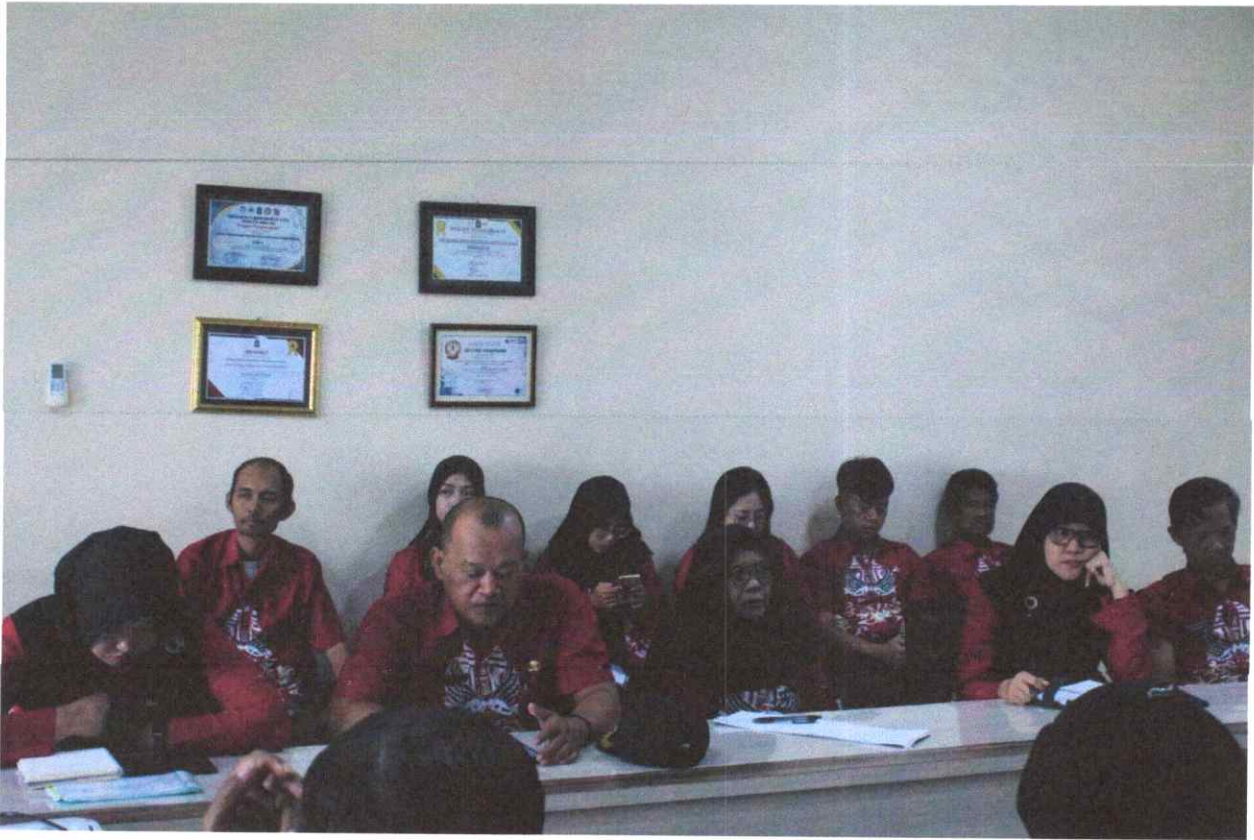
KEGIATAN : Rapat Evaluasi Capaian LKJIP 2025
HARI / TANGGAL : Kamis, 19 Februari 2025
JAM : 13.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Dinas PRKP Kota Blitar

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	P / L	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	Drs. SUYATNO, M.M.	Kepala Dinas	L	1	
2	WIDHI ASTUTI, ST	Plt. Sekretaris / Kabid Perumahan	P		2
3	MUJIONO ST. M.M.	Kabid Kawasan Permukiman	L	3	
4	TUTI SUDARINI, ST.	Kasubbag Program dan Kepegawaian	P		4
5	WINDIATI, S.E.	Kasubbag Umum dan Keuangan	P	5	
6	KENYO ANGGUN POPULARITA, ST.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	P		6
7	AGUS SYAIFUDIN, ST.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	L	7	
8	AGUS ZAINAL ARIFIN, ST., MM.	Kepala UPT Rusunawa	L		8
9	M. NURIL ARDAN, ST.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	L	9	
10	SRI UTAMI, ST.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Muda	P		10
11	HESS PANAITAN, ST.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Ahli Pertama	L	11	
12	NILA JUWITA CRISTIANI, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	P		12
13	NURHIDAYAT, ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	L	13	
14	SOFIA DEWI AMALIA, ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	P		14
15	HARI BUDIYONO, ST.	Penelaah Teknis Kebijakan	L	15	
16	YASH'AD, ST.	Penata Layanan Operasional	L		16
17	TRI HANGGARA WULLY S., A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	L	17	
18	CHINTYA PUTRI HAPSARI, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	P		18
19	VEKTORIA HARINI	Pengadministrasi Perkantoran	P	19	
20	EDY HARYONO	Operator Layanan Operasional	L		20
21	AGUNG BUDI KUNCARA	Operator Layanan Operasional	L	21	
22	FENNY OKTAVIA ANGGADEWI, A.Md.	Arsiparis Terampil	P		22
23	RICKO REFANDA, S.ST.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	L	23	
24	HIMMATUL AZIZAH ALMINA S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	P		24
25				25	
26					26

PPTK

WINDIATI, S.E.
NIP. 19730301 199403 2 007

Dokumentasi Kegiatan :





Rencana Aksi Tindak lanjut LkjIP 2025

No	Permasalahan	Rencana Aksi	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
1	- o Kenaikan jumlah Rumah Layak Huni tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, - o Penerapan standar teknis Rumah Layak Huni di lapangan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi	- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni di seluruh penerima bantuan SERUNI 1. Laporan pendampingan kepada seluruh penerima bantuan
2	1. Menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH 2. Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP 3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan 4. Berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah	1. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN 2. Pengusulan BNBA RTLH kepada Kementerian PKP 3. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN 4. Mendorong penyediaan rumah layak huni terjangkau oleh pengembang perumahan dan masyarakat	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Terlaksananya Koordinasi dan pengusulan dengan pihak luar 2. Dilaksanakan pengusulan BSPS melalui aplikasi SIBARU 3. Telah dilaksanakan koordinasi penanganan RTLH bersama dengan Kementrian PKP dan BAZNAS Kota Blitar 4. Memfasilitasi konsultasi perencanaan perumahan kepada pengembang perumahan

No	Permasalahan	Rencana Aksi	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan
3	Belum adanya perencanaan yg terintegrasi dalam penanganan kumuh skala Kawasan	Perlu disusun perencanaan secara terpadu dalam penanganan kawasan kumuh skala kawasan dan kolaborasi antar OPD dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	✓ Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan
4	Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	✓ Peningkatan kualitas jalan dan drainase dalam kondisi baik